



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

*[Handwritten signature]*

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

f a f

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 75);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 157);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f u f /

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang selanjutnya disingkat DPMDSos adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBHPRD adalah bagian hasil penerimaan pajak dan retribusi Daerah Kabupaten yang diberikan kepada Desa.
15. Nilai Bobot adalah nilai bobot Desa yang ditentukan berdasarkan realisasi pajak dan retribusi per desa.
16. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa / BUMDesa Bersama, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

P K B T

17. Maksud pemberian DBHPRD kepada pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Desa melalui penyertaan modal BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama;

#### Pasal 2

- (1) Penyediaan Dana BHPRD dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Desa melalui penyertaan modal BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama;
- (2) Tujuan diberikannya Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Prinsip pengelolaan Dana Bagi Hasil di Desa sebagai berikut :
  - a. Dana Bagi Hasil dikelola dalam satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
  - b. Dana Bagi Hasil merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa.
  - c. Dana Bagi Hasil dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
  - d. Penggunaan Dana Bagi Hasil dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
  - e. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dan penanggung jawab penggunaan Dana Bagi Hasil.

## **BAB II PENGALOKASIAN**

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bagi Hasil kepada desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah
- (3) Pengalokasian anggaran Dana Bagi Hasil kepada desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah.

f : k f 

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBAGIAN**

Pasal 4

- (1) Pembagian Dana Bagi Hasil yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 sebagai berikut :
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi hasil pajak Daerah dari masing –masing desa.
- (2) Teknis perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil kepada pemerintah desa, pelaksanaannya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur setelah menerima data fisik pajak daerah dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 5

Besaran alokasi DBHPRD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 4.133.500.000,- (empat miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENYALURAN DAN PENGGUNAAN**  
**DANA BAGI HASIL**

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil untuk pemerintah desa diatur dan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melalui mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil untuk desa dibagi dengan ketentuan :
  - a. Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan setiap triwulan dengan melihat posisi Keuangan Kas Daerah ;
  - b. Penyaluran Dana Bagi Hasil mulai tahun selanjutnya akan didasarkan pada Realisasi Pendapatan pajak triwulan ke empat dengan melihat posisi keuangan kas daerah.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan melalui mekanisme pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) masing – masing.



- (4) Penyaluran Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama.

**BAB V**  
**PELAPORAN DANA BAGI HASIL**

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil pada setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan realisasi Pendapatan triwulan.
  - b. laporan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Bagi Hasil triwulan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaen Barito melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten Barito Timur melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah desa.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

Kurang salur/lebih salur Dana Bagi Hasil akan diperhitungkan pada triwulan selanjutnya, namun untuk triwulan ke empat akan diperhitungkan pada tahun berikutnya.

f      x      f      /

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 20 Maret 2023

**BUPATI BARITO TIMUR,**



**AMPERA A.Y. MEBAS**

Diundangkan di Tamiang Layang  
Pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,



**PANAHAN MOETAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 162

f	n	h	h



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN**  
**PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL**  
**PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN**  
**2023**

**Lembar Perhitungan Pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Bagi Pemerintah Desa**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	Nama Desa	Tahun 2023					Total DBHPRD Per Desa
		Alokasi Dasar 60%	Alokasi Formula (40%)				
			Realisasi Pajak dan Retribusi Per Desa	Realisasi Pajak dan Retribusi 100 Desa	Bobot	Alokasi Formula Per Desa	
1	2	3	4	5	6=4/5	7	8
<b>I KECAMATAN DUSUN TIMUR</b>							
1	PULAU PATAI	24.801.000	3.665.377	569.149.803	0,00644	10.648.048	35.449.048
2	SARAPAT	24.801.000	9.420.766	569.149.803	0,01655	27.367.653	52.168.653
3	MAGANTIS	24.801.000	7.898.978	569.149.803	0,01388	22.946.806	47.747.806
4	JA'AR	24.801.000	29.404.032	569.149.803	0,05166	85.419.737	110.220.737
5	MATABU	24.801.000	25.823.402	569.149.803	0,04537	75.017.882	99.818.882
6	DORONG	24.801.000	7.656.697	569.149.803	0,01345	22.242.971	47.043.971
7	DIDI	24.801.000	7.006.227	569.149.803	0,01231	20.353.333	45.154.333
8	KARANG LANGIT	24.801.000	9.427.025	569.149.803	0,01656	27.385.836	52.186.836
9	HARINGEN	24.801.000	6.880.602	569.149.803	0,01209	19.988.388	44.789.388
10	JAWETEN	24.801.000	48.423.800	569.149.803	0,08508	140.672.825	165.473.825
11	MATARAH	24.801.000	4.511.048	569.149.803	0,00793	13.104.752	37.905.752
12	MARAGUT	24.801.000	2.478.211	569.149.803	0,00435	7.199.289	32.000.289
13	MANGKARAP	24.801.000	3.273.935	569.149.803	0,00575	9.510.895	34.311.895
14	GUMPA	24.801.000	4.243.950	569.149.803	0,00746	12.328.823	37.129.823
15	SUMUR	24.801.000	6.044.231	569.149.803	0,01062	17.558.702	42.359.702
16	HARARA	24.801.000	1.104.839	569.149.803	0,00194	3.209.596	28.010.596
<b>Total</b>		<b>396.816.000</b>	<b>177.263.120</b>		<b>0,04317</b>	<b>514.955.537</b>	<b>911.771.537</b>
<b>II KECAMATAN BENUA LIMA</b>							
1	KANDRIS	24.801.000	375.037	569.149.803	0,00066	1.089.496	25.890.496
2	BANYU LANDAS	24.801.000	1.151.464	569.149.803	0,00202	3.345.043	28.146.043
3	BAGOK	24.801.000	7.170.826	569.149.803	0,01260	20.831.499	45.632.499
4	BAMBAN	24.801.000	2.974.506	569.149.803	0,00523	8.641.044	33.442.044
5	TEWAH PUPUH	24.801.000	4.454.504	569.149.803	0,00783	12.940.489	37.741.489
6	GUDANG SENG	24.801.000	1.305.888	569.149.803	0,00229	3.793.650	28.594.650
<b>Total</b>		<b>148.806.000</b>	<b>17.432.225</b>		<b>0,03063</b>	<b>50.641.221</b>	<b>199.447.221</b>
<b>III KECAMATAN PATANGKEP TUTUI</b>							
1	PULAU PADANG	24.801.000	2.786.251	569.149.803	0,00490	8.094.156	32.895.156
2	KAMBITIN	24.801.000	1.849.283	569.149.803	0,00325	5.372.232	30.173.232
3	RAMANIA	24.801.000	2.367.888	569.149.803	0,00416	6.878.797	31.679.797
4	BENTOT	24.801.000	2.923.325	569.149.803	0,00514	8.492.361	33.293.361
5	AMPARI BURA	24.801.000	436.134	569.149.803	0,00077	1.266.984	26.067.984
6	KOTAM	24.801.000	9.749.286	569.149.803	0,01713	28.322.015	53.123.015
7	BETANG NALONG	24.801.000	2.457.626	569.149.803	0,00432	7.139.489	31.940.489
8	MAWANI	24.801.000	2.470.576	569.149.803	0,00434	7.177.109	31.978.109
9	JANGO	24.801.000	1.773.360	569.149.803	0,00312	5.151.673	29.952.673
10	LALAP	24.801.000	2.126.944	569.149.803	0,00374	6.178.846	30.979.846
<b>Total</b>		<b>248.010.000</b>	<b>28.940.673</b>		<b>0,05085</b>	<b>84.073.663</b>	<b>332.083.663</b>
<b>IV KECAMATAN AWANG</b>							
1	JANAH JARI	24.801.000	2.776.893	569.149.803	0,00488	8.066.971	32.867.971
2	BANGKIRAYEN	24.801.000	3.741.265	569.149.803	0,00657	10.868.505	35.669.505
3	HAYAPING	24.801.000	5.792.322	569.149.803	0,01018	16.826.897	41.627.897
4	TANGKAN	24.801.000	2.439.583	569.149.803	0,00429	7.087.074	31.888.074
5	WUNGKUR NANAI	24.801.000	2.322.714	569.149.803	0,00408	6.747.565	31.548.565
6	AMPARI	24.801.000	2.718.122	569.149.803	0,00478	7.896.239	32.697.239
7	APAR BATU	24.801.000	1.557.165	569.149.803	0,00274	4.523.619	29.324.619
8	BIWAN	24.801.000	1.049.165	569.149.803	0,00184	3.047.861	27.848.861
9	JANAH MANSIWU	24.801.000	1.685.382	569.149.803	0,00296	4.896.093	29.697.093
10	DANAU	24.801.000	1.362.665	569.149.803	0,00239	3.958.589	28.759.589
11	PIANGGU	24.801.000	2.271.479	569.149.803	0,00399	6.598.726	31.399.726
<b>Total</b>		<b>272.811.000</b>	<b>27.716.755</b>		<b>0,04870</b>	<b>80.518.139</b>	<b>353.329.139</b>
<b>V KECAMATAN DUSUN TENGAH</b>							
1	SAING	24.801.000	6.233.519	569.149.803	0,01095	18.108.590	42.909.590
2	RODOK	24.801.000	14.680.097	569.149.803	0,02579	42.646.193	67.447.193
3	AMPAH II	24.801.000	3.232.367	569.149.803	0,00568	9.390.139	34.191.139
4	PUTAI	24.801.000	4.076.529	569.149.803	0,00716	11.842.459	36.643.459
5	NETAMPIN	24.801.000	3.042.046	569.149.803	0,00534	8.837.250	33.638.250

f k b

6	SUMBER GARUNG	24.801.000	5.769.476	569.149.803	0,01014	16.760.529	41.561.529
7	MUARA AWANG	24.801.000	1.221.542	569.149.803	0,00215	3.548.622	28.349.622
	<b>Total</b>	<b>173.607.000</b>	<b>38.255.576</b>		<b>0,06722</b>	<b>111.133.781</b>	<b>284.740.781</b>
<b>VI PEMATANG KARAU</b>							
1	MUARA PLANTAU	24.801.000	2.229.291	569.149.803	0,00392	6.476.168	31.277.168
2	KETAB	24.801.000	1.876.662	569.149.803	0,00330	5.451.768	30.252.768
3	KUPANG BERSIH	24.801.000	4.655.122	569.149.803	0,00818	13.523.292	38.324.292
4	TUYAU	24.801.000	10.047.821	569.149.803	0,01765	29.189.270	53.990.270
5	PINANG TUNGGAL	24.801.000	1.640.649	569.149.803	0,00288	4.766.142	29.567.142
6	NAGALEAH	24.801.000	3.067.882	569.149.803	0,00539	8.912.304	33.713.304
7	LAMPEONG	24.801.000	3.811.261	569.149.803	0,00670	11.071.846	35.872.846
8	BARARAWA	24.801.000	2.305.039	569.149.803	0,00405	6.696.219	31.497.219
9	BAMBULUNG	24.801.000	22.676.759	569.149.803	0,03984	65.876.775	90.677.775
10	LEBO	24.801.000	1.189.010	569.149.803	0,00209	3.454.115	28.255.115
11	MURU DUJUNG	24.801.000	3.155.544	569.149.803	0,00554	9.166.965	33.967.965
12	TUMPUNG ULUNG	24.801.000	2.672.211	569.149.803	0,00470	7.762.866	32.563.866
13	SUMBER REJO	24.801.000	14.546.825	569.149.803	0,02556	42.259.033	67.060.033
	<b>Total</b>	<b>322.413.000</b>	<b>73.874.076</b>		<b>0,12980</b>	<b>214.606.764</b>	<b>537.019.764</b>
<b>VII KECAMATAN PAJU EPAT</b>							
1	JURU BANU	24.801.000	29.750	569.149.803	0,00005	86.425	24.887.425
2	TELANG BARU	24.801.000	50.229.302	569.149.803	0,08825	145.917.872	170.718.872
3	TAMPU LANGIT	24.801.000	1.902.114	569.149.803	0,00334	5.525.707	30.326.707
4	TELANG	24.801.000	3.803.293	569.149.803	0,00668	11.048.699	35.849.699
5	MAIPE	24.801.000	1.638.865	569.149.803	0,00288	4.760.960	29.561.960
6	MURUTUWU	24.801.000	3.815.714	569.149.803	0,00670	11.084.782	35.885.782
7	BALAWA	24.801.000	3.419.844	569.149.803	0,00601	9.934.766	34.735.766
8	KALINAPU	24.801.000	-	569.149.803	-	-	24.801.000
9	SIONG	24.801.000	5.358.080	569.149.803	0,00941	15.565.409	40.366.409
	<b>Total</b>	<b>223.209.000</b>	<b>70.196.962</b>		<b>0,12334</b>	<b>203.924.619</b>	<b>427.133.619</b>
<b>VIII KECAMATAN RAREN BATUAH</b>							
1	PURI	24.801.000	4.810.879	569.149.803	0,00845	13.975.771	38.776.771
2	LENGGANG	24.801.000	5.103.151	569.149.803	0,00897	14.824.831	39.625.831
3	BATUAH	24.801.000	5.960.311	569.149.803	0,01047	17.314.911	42.115.911
4	UNSUM	24.801.000	5.062.457	569.149.803	0,00889	14.706.614	39.507.614
5	BARUYAN	24.801.000	2.768.713	569.149.803	0,00486	8.043.208	32.844.208
6	TURAN AMIS	24.801.000	5.095.190	569.149.803	0,00895	14.801.704	39.602.704
7	MALINTUT	24.801.000	2.880.718	569.149.803	0,00506	8.368.586	33.169.586
8	TANGKUM	24.801.000	8.139.483	569.149.803	0,01430	23.645.482	48.446.482
9	SIBUNG	24.801.000	4.456.166	569.149.803	0,00783	12.945.317	37.746.317
	<b>Total</b>	<b>223.209.000</b>	<b>44.277.068</b>		<b>0,07780</b>	<b>128.626.425</b>	<b>351.835.425</b>
<b>IX KECAMATAN PAKU</b>							
1	TAMPA	24.801.000	9.481.846	569.149.803	0,01666	27.545.093	52.346.093
2	KALAMUS	24.801.000	2.294.373	569.149.803	0,00403	6.665.233	31.466.233
3	SIMPANG BANGKU	24.801.000	7.063.567	569.149.803	0,01241	20.519.908	45.320.908
4	PATUNG	24.801.000	7.392.564	569.149.803	0,01299	21.475.656	46.276.656
5	RUNGGU RAYA	24.801.000	1.853.717	569.149.803	0,00326	5.385.112	30.186.112
6	BANTAI NAPU	24.801.000	2.558.199	569.149.803	0,00449	7.431.657	32.232.657
7	TARINSING	24.801.000	791.181	569.149.803	0,00139	2.298.408	27.099.408
8	PAKU BETO	24.801.000	2.247.606	569.149.803	0,00395	6.529.374	31.330.374
9	GANDRUNG	24.801.000	2.183.123	569.149.803	0,00384	6.342.048	31.143.048
10	PANGKAN	24.801.000	1.942.144	569.149.803	0,00341	5.641.996	30.442.996
11	KUPANG BARU	24.801.000	837.242	569.149.803	0,00147	2.432.217	27.233.217
12	LUAU JAWUK	24.801.000	19.750.841	569.149.803	0,03470	57.376.881	82.177.881
	<b>Total</b>	<b>297.612.000</b>	<b>58.396.403</b>		<b>0,10260</b>	<b>169.643.585</b>	<b>467.255.585</b>
<b>X KECAMATAN KARUSEN JANANG</b>							
1	DAYU	24.801.000	8.425.500	569.149.803	0,01480	24.476.371	49.277.371
2	WURAN	24.801.000	3.464.539	569.149.803	0,00609	10.064.606	34.865.606
3	IPU MEA	24.801.000	4.909.923	569.149.803	0,00863	14.263.497	39.064.497
4	LAGAN	24.801.000	7.857.971	569.149.803	0,01381	22.827.679	47.628.679
5	PUTUT TAWULUH	24.801.000	961.714	569.149.803	0,00169	2.793.813	27.594.813
6	SIMPANG NANENG	24.801.000	4.056.924	569.149.803	0,00713	11.785.506	36.586.506
7	KANDRIS	24.801.000	3.120.374	569.149.803	0,00548	9.064.795	33.865.795
	<b>Total</b>	<b>173.607.000</b>	<b>32.796.945</b>		<b>0,05762</b>	<b>95.276.267</b>	<b>268.883.267</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>2.480.100.000</b>	<b>569.149.803</b>		<b>1</b>	<b>1.653.400.000</b>	<b>4.133.500.000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu DBHPRD Kabupaten Barito Timur	4.133.500.000
Pagu Alokasi Dasar (6	2.480.100.000
Pagu Bagian Formula	1.653.400.000
Jumlah Desa	100

**BUPATI BARITO TIMUR,**

**AMPERA A.Y. MEBAS**

f k b